



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Alokasi Pembebasan 11 Ruas Rp 2 Triliun		
Date	3 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	26	Article Size	
Journalist	Dimas Novita Sari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Alokasi Pembebasan 11 Ruas Rp2 Triliun

JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana senilai Rp2 triliun untuk pembebasan tanah 11 ruas jalan tol dalam daftar isi pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian 2014.

Dimas Novita S.
dimas.novita@bisnis.co.id

Kasubdit Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Kementerian PU Herry Marzuki mengatakan pengadaan lahan 11 proyek jalan bebas hambatan tersebut ditargetkan selesai pada 2014.

"Pemerintah menyediakan dana tersebut untuk mengejar target pembebasan tanah pada akhir tahun depan, sehingga pembangunan bisa dipercepat," katanya, Rabu (2/10).

Dari 11 ruas tersebut, Herry menjelaskan, pemerintah memprioritaskan dua ruas trans-Jawa yakni Solo-Mattingan Seksi I dan II, serta Mantingan-Kertosono Seksi I dan II, sehingga anggaran tahun depan lebih besar 100% dari tahun sebelumnya.

Adapun sembilan ruas lainnya merupakan jalan tol nontrans-Jawa, tol Jabodetabek, dan trans-Sumatra, yang umumnya terdapat dana dukungan pemerintah di dalam peng-

▶ Anggaran tahun ini masih tersisa Rp550 miliar.

▶ Empat Ruas trans-Sumatra tetap menggunakan UU lama.

usahaan jalan tol tersebut.

Kesembilan ruas tersebut ialah Pandaan-Malang, Pasir Kojasoreang, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Medan-Kualanamu, Medan-Binjai, Pekanbaru-Kandis, Kandis-Dumai, dan Palembang-Indralaya.

Sementara itu, dia menjelaskan pada tahun ini kementerian mengalokasikan dana Rp1 triliun untuk pengadaan lahan dari sembilan ruas jalan tol. Hingga saat ini, penyerapannya baru Rp450 miliar dan tersisa Rp550 miliar yang realisasinya masih terus didorong.

Kesembilan jalan tol tersebut yakni Solo-Mattingan Seksi I & II, Mantingan-Solo Seksi I & II, Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, Pekanbaru-Kandis, Kandis-Dumai, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Pasir Kojasoreang, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.

reang, Pandaan-Malang, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.

"Tahun lalu penyerapannya mencapai 80%, sisanya kami kembalikan ke negara. Tahun ini kami harapkan dan optimistis semoga penyerapannya maksimal," jelasnya.

TRANS-SUMATRA

Pada perkembangan lainnya, pemerintah menargetkan pembebasan lahan jalan tol Palembang-Indralaya dapat mencapai 100% pada akhir tahun ini, menyusul pemberlakuan UU No. 2/2012 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di proyek tersebut.

"Saat ini sudah sampai tahap musyawarah, dan kami terus berkoordinasi dengan BPN [Badan Pertanahan Nasional] untuk segera pelaksanaan fisik."

Dengan penggunaan UU baru tersebut, maka pihaknya yakin pembebasan lahannya dapat berlangsung cepat karena penolakan masyarakat diselesaikan di pengadilan.

Untuk empat ruas lainnya yaitu Medan-Kuala Namu, Medan Binjai, Pekanbaru-Kandis, dan Kandis-Dumai, Herry menjelaskan tetap menggunakan UU lama karena proyek tersebut sudah pernah ditawarkan sebelumnya dan juga tengah proses pembebasan lahan.

Herry menuturkan hingga kini pembebasan lahan Medan-Kuala Namu sudah mencapai 72,67% dan diharapkan pada akhir tahun bisa mencapai 80%.

Sementara itu, untuk Medan-Binjai, surat penetapan pembangunan

lahan proyek (SP2LP) baru saja turun pada pekan ini. "Diharapkan pada akhir tahun kita sudah memulai pembebasan lahan," paparnya.

Adapun ruas Pekanbaru-Kandis dan Kandis-Dumai, pemerintah sudah menyepakati pembebasan lahan seluas 70 hektare atau 7 km dari panjang keseluruhan 19 km dengan masyarakat setempat. "Nilainya sekitar Rp8 miliar dan tinggal dibayar saja."

Berkaitan dengan jalan tol Palembang-Indralaya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sumsel akan mulai eksekusi pembebasan lahan seluas 56 hektare pada akhir pekan ini agar proyek tersebut berjalan lancar dan tepat waktu.

Kepala BBPN III Bastian Sihombing mengatakan pihaknya tinggal menunggu keluarnya surat penunjukan dari Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum kepada BPN Sumsel untuk menjalankan land clearing.

"Kemungkinan pada 4 Oktober atau 5 Oktober 2013 ini sudah bisa eksekusi lahan," katanya di Palembang, Selasa (1/10).

Sementara itu, dananya dipastikan Bastian tidak mengalami kendala. "Kami alokasikan bergantung pada kebutuhan terlebih dahulu, dana ini diperuntukkan di seluruh Indonesia, yang bisa menyerap lebih dulu, dia yang dapat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kanwil Sumsel Afrizal mengatakan pihaknya akan langsung mengeksekusi setelah surat permohonan dari Kementerian PU turun.

"Kami segera bentuk pelaksanaan pengadaan tanah, proses penyelesaiannya mungkin pada awal Desember nanti untuk segmen 1 dengan luasan 56 ha," katanya.

Sisanya, diselesaikan pada 2014 mengingat adanya keterbatasan waktu sehingga bisa dimulai pada Januari tahun depan. (Dinda Wulandari) □